#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SEI MENGGARIS

2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RENJA kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan/sub kegitan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan/sub kegiatan, analisis kinerja pelayanan kecamatan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan/sub kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Kewilayahan.

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan Kecamatan dalam bidang Kewilayahan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2021 – 2026 yaitu **“ Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera “.**

Tahun Anggaran 2024 adalah tahun Keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2021-2026, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Tentang Kelurahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-37 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 65);
29. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2024 adalah;

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024.

- Melakukan Singkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2024 adalah :

- Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nunukan yang termuat dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama di bidang Kewilayahan.
- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah , serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-2), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya..

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan

indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing,

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
   Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

.3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/Sub Kegiatan Misal:
b. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
c. Pencapaian SDGs,
d. Pengentasan kemiskinan,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah terisolir,
g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan/sub kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan/sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir di cantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Prangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah,serta capaian pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJAKECAMATAN SEI MENGGARIS TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja Program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kecamatan Sei Menggaris pada tahun 2022.

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2022, dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub keiatannya mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021, Alokasi anggaran Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan pada Tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan di dalam DPA SKPD Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang ditetapkan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.521.627.683,00** dan realisasi anggaran (per 31 Desember 2022) sebagaimana terinci di dalam tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	**1.521.627.683,00**	**1.490.234.116,00**	97,94
Belanja Pegawai	1.070.837.939,00	1.054.085.776,00	98,44
Belanja Barang dan Jasa	443.309.744,00	428.711.340,00	96,71
BELANJA MODAL	**7.480.000,00**	**7.437.000,00**	99,43

Dari table di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan bahwa realisasi penggunaan anggaran pada Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sampai 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.1.490.234.116,00** atau **97,94%**
Anggaran Belanja Langsung pada Kecamatan Sei Menggaris dipergunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) program rutin dan 3 (Tiga) program pembangunan/ teknis, antara lain:

a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selengkapnya realisasi anggaran belanja langsung per program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kab. Nunukan TA. 2022 sebagaimana tabel berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	
					KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)
1	2			3	5	
	BELANJA LANGSUNG					
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**1.477.205.383,00**	**1.446.518.936,00**	**97,92**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**16.023.700,00**	**15.460.000,00**	**96,48**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.863.700,00	6.570.000,00	95,72
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.160.000,00	8.890.000,00	97,05
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1.070.837.939,00**	**1.054.085.776,00**	**98,44**
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.070.837.939,00	1.054.085.776,00	98,44
	3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**144.882.700,00**	**144.530.140,00**	**99,76**
		4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.997.800,00	2.996.000,00	99,94
		5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.480.000,00	7.437.000,00	99,43
		6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.306.500,00	14.172.245,00	99,06
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.332.400,00	9.328.995,00	99,96
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.766.000,00	110.595.900,00	99,85
	4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**223.604.544,00**	**210.631.320,00**	**94,20**
		9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	9.660.000,00	9.611.000,00	99,49
		10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.944.544,00	201.020.320,00	93,96
	5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**21.856.500,00**	**21.811.700,00**	**99,80**
		11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.554.000,00	12.549.000,00	99,96
		12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.302.500,00	9.262.700,00	99,57
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**39.482.300,00**	**38.775.180,00**	**98,21**
	6	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**39.482.300,00**	**38.775.180,00**	**98,21**
		13	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.577.800,00	29.330.000,00	99,16
		14	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.904.500,00	9.445.180,00	95,36
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**-**	**-**	
	7	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**-**	**-**	
		15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		
IV	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**4.940.000,00**	**4.940.000,00**	**100,00**
	8	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**4.940.000,00**	**4.940.000,00**	**100,00**
		16	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.940.000,00	4.940.000,00	100,00
		17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan.Program dan kegiatan/sub kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun.

SKPD Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2022.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2022 dapat dilihat dari berbagai indikator terlampir

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah)Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023 n-3)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100	Persen	100	100	100	100	100	300	300
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Laporan	100	100	100	100	100	300	300
7	01	02	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	4	2	2	100	2	8	400
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100	Persen	100	100	100	100	100	300	300
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	4	Lapran	8	4	4	100	4	16	400

7	01	04	2,02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	8	4	4	100	4	16	400
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100	Persen	100	100	100	100	100	300	300
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4	Desa	4	4	4	100	4	12	300
7	01	06	2,01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4	Laporan	8	4	4	100	4	16	400
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	Persen	100	100	100	100	100	300	300
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	8	Dokumen	16	8	8	100	8	32	400
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	4	2	2	100	2	8	400
7	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6	Laporan	12	6	6	100	6	24	400
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5	Unit Kerja	5	5	5	100	5	15	300
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	Orang/Bulan	10	10	10	100	10	30	300
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5	Unit Kerja	5	5	5	100	5	15	300

7	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2	1	1	100	1	4	400
7	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	1	1	100	5	7	140
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	6	3	3	100	3	12	400
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	4	2	2	100	2	8	400
7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	4	2	2	100	2	8	400
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5	Unit Kerja	5	5	5	100	5	15	300
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	6	3	3	100	3	12	400
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	4	2	2	100	2	8	400
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5	Unit Kerja	5	5	5	100	5	15	300
7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	7	7	7	100	7	21	300

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEI MENGGARIS

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang berdasarkan Peraturan Mentri Dalam negeri 86 Tahun 2017. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana urusan Kecamatan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kewilayahan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Nunukan periode tahun 2021-2026, Kecamatan Sei Menggaris memiliki tantangan untuk membantu Kepala Daerah dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemantapan pembangunan perdesaan. Untuk dapat terciptanya Program tersebut diatas maka peran serta Kecamatan Sei Menggaris dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan terhadap masyarakat dan akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan Perdesaan, pengembangan usaha ekonomi dan keuangan perdesaan.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil dalam (outcomes) manfaat (benefits) dan dampak (impach). Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini di ikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayaanan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Tahun Ke -					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke -		Proyeksi	Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-12	-14	-16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				Persen	87,15	87,25	87,50	87,75	87,88	87,15	87,25	87,50	

2.3 . ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEI MENGGARIS

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2023, dapat dikatakan hasilnya cukup Baik. Adapun isiu-isu Strategis Penyelnggaran Pemerintahan Kecamatan Sei Menggaris Sebagai Berikut :

a. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sei Menggaris, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personal;
b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses Pelayanan;
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat; dan
d. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa/kelurahan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan diatas kecamatan Sei Menggaris ,dalam pelaksanaan urusan Kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan/Sub kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukuan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamaan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

VISI	**: Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera**
MISI 4	**: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinasmin, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatknya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Melaksanaka penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, RPJMD Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 adalah tahapan Pertama dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakl Kepalah daerah terpilih dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2030.RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024, maka program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan, maka kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil

langkah kongrit dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan, maka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa dengan melihat aspek sosial budaya masyarakat
2. Mengoptimalkan Kerjasama antar desa untuk menikatkan perekonomian masyarakat di perdesaan dan kawasan perdesaan
3. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan, SDM apartur desa dan PBD
4. Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok, lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat di desa dalam mengelolah potensi sumber daya ekonomi

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih berdaya,maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan – kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama desa, pengembangan partisifasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM), penggalian dan pelestarian nilai – nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Berikut **Tabel 2.4** Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.4 (TC-31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**		**Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**1.620.829.458,14**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**		**Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**1.826.320.781,00**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	10 Dokumen	**15.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	10 Dokumen	**11.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Dokumen	3.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Dokumen	5.000.000	

		2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	5 Unit Kerja	**1.091.340.748**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	5 Unit Kerja	**1.332.820.781**	
			4	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	30 Orang/Bulan	**1.091.340.748**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	30 Orang/Bulan	**1.332.820.781**	
			5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	10.000.000	
		3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	5 Unit Kerja	**132.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	5 Unit Kerja	**112.500.000**	
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	
			7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
			8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	
			9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	
			10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	90.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	80.000.000	

		4		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	5 Unit Kerja	**350.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	5 Unit Kerja	**330.000.000**	
			11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50.000.000	
			12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	280.000.000	
		6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	5 Unit Kerja	**31.988.710**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	5 Unit Kerja	**40.000.000**	
			13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	31.988.710	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	40.000.000	
			14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	
			15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.350.141	
II				**Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien**	100%	**32.000.000**	**Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien**	100%	**30.000.000**	
		7		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Sei Menggaris**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100 Laporan	**32.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Sei Menggaris**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100 Laporan	**30.000.000**	

			16	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	20.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	20.000.000	
			17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	12.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000	
		8		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	4 Laporan	**50.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	4 Laporan	**30.000.000**	
			18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	30.000.000	
III				**Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	100%	100000000	**Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	100%	70000000	
		9		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan**	4 Laporan	100000000	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kec. Sei Menggaris	**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan**	4 Laporan	70000000	
			19	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	100.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	70.000.000	
IV				**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional**	42,91%	**20.000.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional**	42,91%	**20.000.000**	

				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec. Sei Menggaris**	**Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi**	**4 Desa**	**20.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Sei Menggaris**	**Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi**	**4 Desa**	**20.000.000**	
			20	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	20.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Sei Menggaris	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	20.000.000	

2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2024 disamping berpedoman pada Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 serta Tidak Mengakomodir Usulan Masyarakat tetapi hanya meneruskan kan ke OpD yang Menangani dalam Rapat Musrembang Tingkat Kecamatan, Kewilayahan Maupun Musrembang RKPD tingkat Kabupaten

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan. Salnah satu agenda pembangunan global dalam Milenium Development Goals (MDG's).

Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ditingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (peolpe centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisifasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth), Kesetaraan Antar Generasi (Intergenerational equity) dan Pengarustamaan Gender (PUG).

Maka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa. Dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan dana untuk Program dan kegiatan di desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan dalam melaksanakan misi. Tujuan dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (dassolen) dan kenyataan (das sein) pada kurun waktu tertentu.

Adapun tujuan dari Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021 s/d 2026 adalah

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas

3.2.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya alam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Dalam merumuskan sasaran harus memperhatikan criteria SMART-C yaitu:

a. *Specific (spesifik),* yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas,
b. *Measurable (dapat diukur),* yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur,
c. *Achievable (dapat dicapai),* yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada,
d. *Relevant (relevan),* yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan
e. *Time Limit (Batas waktu),* yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan , dan
f. *Continously improve (perbaikan berkelanjutan),* yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Sasaran merupakan bagian intergral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, bulanan.

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran strategis 2021 s/d 2026 sebagai penjabaran dari Program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada pada Kecamatan Sei menggaris Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sei Menggaris Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD selanjutnya disusun dalam tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris
Kabupaten Nunukan 2021 -2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87,15	87,25	87,5	87,75	87,88
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sei Menggaris	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	Persen	100	100	100	100	100
			Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100

3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, maka rencana program dan kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung terdiri dari :
1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai
   b. Belanja Barang/Jasa

2. Belanja Modal
   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan Kantor. Adapun rincian kegiatan /sub kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini mendukung kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat Adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

6. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal TerkaitSub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa
   b. Sub Kegiatan FPeningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini mendukung kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat.. Adapun rincian kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

8. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

9. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Nunukan
Kecamatan Sei Menggaris

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING (SUMBER USULAN)	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*				*8*	
	Unsur Kewilayahan								
	Urusan Kecamatan								
	KECAMATAN SEI MENGGARIS								
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**		**100%**	**1.658.840.748**	**APBD II**	**Prioritas**	**100%**	**1.658.840.748**
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kec. Sei Menggaris	8 Dokumen	**10.000.000**	**APBD II**	**Prioritas**	8 Dokumen	**10.000.000**
1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sei Menggaris	2 Dokumen	3.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	2 Dokumen	5.000.000
2	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec. Sei Menggaris	4 Laporan	3.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	4 Laporan	5.000.000
3	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kec. Sei Menggaris	2 Laporan	5.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	2 Laporan	5.000.000
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	Kec. Sei Menggaris	5 Unit Kerja	**1.332.820.781**	**APBD II**	**Prioritas**	5 Unit Kerja	**1.091.340.748**
4	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sei Menggaris	1.332.820.781	1.091.340.748	**APBD II**	**Prioritas**	10 Orang/Bulan	1.091.340.748
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Sei Menggaris	10.000.000	15.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	4 Dokumen	15.000.000
c	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	Kec. Sei Menggaris	5 Unit Kerja	**112.500.000**			5 Unit Kerja	**132.500.000**

	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Sei Menggaris	2.500.000	2.500.000	**APBD II**	**Prioritas**	1 Paket	2.500.000
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Sei Menggaris	10.000.000	10.000.000			1 paket	10.000.000
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Sei Menggaris	15.000.000	15.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	3 paket	20.000.000
	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Sei Menggaris	5.000.000	5.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	2 Paket	10.000.000
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sei Menggaris	80.000.000	80.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	2 Laporan	90.000.000
D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Kec. Sei Menggaris	5 Unit Kerja	**330.000.000**	**APBD II**	**Prioritas**	5 Unit Kerja	**350.000.000**
	11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Sei Menggaris	50.000.000	50.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	3 Laporan	50.000.000
	12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Sei Menggaris	280.000.000	300.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	2 Laporan	300.000.000
F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Kec. Sei Menggaris	5 Unit Kerja	**112.500.000**	**APBD II**	**Prioritas**	5 Unit Kerja	**75.000.000**
	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Sei Menggaris	5 Unit	45.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	5 Unit	45.000.000
	14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Sei Menggaris	5 Unit	5.000.000			5 Unit	5.000.000
	15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Sei Menggaris	3 Unit	25.000.000			3 Unit	25.000.000
II		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien**		**100%**	**82.000.000**	**APBD II**	**Prioritas**	**100%**	**82.000.000**
G		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Sei Menggaris	100	**32.000.000**	**APBD II**	**Prioritas**	100	**32.000.000**
	16	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sei Menggaris	2 laporan	20.000.000	**APBD II**	**Prioritas**	2 laporan	20.000.000

	17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sei Menggaris	1 Dokumen	12.000.000	APBD II	Prioritas	1 Dokumen	12.000.000
H		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec. Sei Menggaris	15 Desa	**50.000.000**	APBD II	Prioritas	15 Desa	**50.000.000**
	18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sei Menggaris	4 laporan	50.000.000	APBD II	Prioritas	4 laporan	50.000.000
III		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**		**100%**	**100.000.000**	APBD II	Prioritas	**100%**	**100.000.000**
I		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan**	Kec. Sei Menggaris	4 Laporan	**100.000.000**	APBD II	Prioritas	4 Laporan	**100.000.000**
	19	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Sei Menggaris	4 Laporan	100.000.000	APBD II	Prioritas	4 Laporan	100.000.000
IV		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional**		**100%**	**20.000.000**	APBD II	Prioritas	**100%**	**20.000.000**
J		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi**	Kec. Sei Menggaris	**4 Desa**	20.000.000	APBD II	Prioritas	**4 Desa**	20.000.000
	20	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Sei Menggaris	4 laporan	20.000.000	APBD II	Prioritas	4 laporan	20.000.000
Total Anggaran						**1.860.840.748**				**1.860.840.748**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kinerja pada Tahun 2024 merupakan gambaran Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sei Menggaris Kab.Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sei Menggaris

NO			URUSAN BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2024			SUBER DANA (APBD KAB/APBD PROV/APBN-DAK)	CATATATAN PENTING
				INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN /SUB KEGIATAN		
1			2	3		4	5	6	7	8
			Unsur Kewilayahan							
			Urusan Kecamatan							
I			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**1.851.670.922**		**APBD II**	
	A		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	8	**6.000.000**	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		2	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	4	3.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	5.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas

	B		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	Unit Kerja	5	**1.332.820.781**	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	10	1.332.820.781	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	10.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
	C		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	Unit Kerja	5	**112.500.000**	Kec. Sei Menggaris		Prioritas
		4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	15.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	80.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
	D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Unit Kerja	5	**330.000.000**	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	50.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	280.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas

	E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Unit Kerja	5	**70.350.141**	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	40.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	25.350.141	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
II			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien**	Persen	100	**60.000.000**		**APBD II**	
	F		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Laporan	100	**30.000.000**	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		14	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	20.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		15	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	10.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
	G		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Laporan	4	**30.000.000**	Kec. Sei Menggaris		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	30.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas

III			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	Persen	100	**70.000.000**		**APBD II**	
	H		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan**	Laporan	4	**70.000.000**	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		16	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	70.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
IV			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional**	Persen	100	**20.000.000**		**APBD II**	
	I		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi**	Desa	4	20.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
		17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	20.000.000	Kec. Sei Menggaris	**APBD II**	Prioritas
Total Anggaran							**2.001.670.922**			

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris.

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Sei Menggaris, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun dilingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2024, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Nunukan 2021-2026 : "**Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil, Dan Sejahtera".**

Nunukan, 20 April 2023
Camat,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEI MENGGARIS

H. SYAHDAN SE, MM
Pembina , IV/a
Nip. 19650711 200701 1 015